

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia yang telah diurutkan melalui sistem outranking dengan metode Multi Criteria Decision Making (PROMETHEE), terdapat sejumlah provinsi yang memiliki nilai Phi positif dan negatif. Nilai Phi ini menggambarkan kinerja masing-masing provinsi terhadap kriteria yang digunakan, yaitu tingkat upah, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat investasi, tingkat inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi yang memiliki nilai Phi positif menunjukkan bahwa kinerja mereka lebih baik dalam mendukung prioritas pembangunan ekonomi dan sosial dibandingkan dengan provinsi yang memiliki nilai Phi negatif.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa provinsi dengan kinerja terbaik adalah **D.I. Yogyakarta**, yang berada di urutan pertama dalam table ranking terkini. menunjukkan keunggulan pada beberapa kriteria, terutama tingkat investasi, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan, yang nilai Phi-nya mendekati angka 1. Keunggulan ini didukung oleh infrastruktur yang memadai, jumlah penduduk besar dengan produktivitas tinggi, serta pendidikan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan **D.I. Yogyakarta** yang berada pada posisi tinggi, menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang baik. Oleh karena itu, provinsi ini dapat dijadikan model bagi daerah lain dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebaliknya, provinsi dengan kinerja terburuk adalah Papua Barat, yang berada di urutan terbawah dalam table ranking. Papua Barat memiliki banyak kriteria yang memberikan kontribusi negatif terhadap nilai Phi, seperti tingkat investasi, tingkat pendidikan, dan inflasi. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, provinsi ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan ekonomi dan sosialnya. IPM Papua Barat juga berada pada posisi rendah, mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa Papua Barat menghadapi kendala signifikan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi dengan nilai Phi positif tidak selalu memiliki kinerja terbaik dalam semua kriteria, dan begitu pula sebaliknya. Setiap provinsi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, seperti kondisi geografis, infrastruktur, kebijakan pemerintah, serta gaya hidup masyarakat. Misalnya, provinsi dengan jumlah penduduk besar dapat memiliki kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi beban jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung produktivitas masyarakat.

Rata-rata hasil dari action profile menunjukkan bahwa kriteria seperti tingkat upah, tingkat pendidikan, dan IPM memiliki kontribusi yang cenderung positif terhadap pembangunan, tetapi dalam beberapa kasus juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Begitu pula dengan kriteria seperti inflasi dan investasi, yang biasanya berpengaruh negatif, tetapi dalam konteks tertentu dapat memberikan dampak positif, terutama dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional.

Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa setiap provinsi perlu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya masing-masing untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kebijakan yang fokus pada peningkatan investasi, pendidikan, dan pengendalian inflasi akan sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

## **V2 Saran**

### **1. Aspek Teoritis**

- a. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi kriteria atau variabel yang berbeda dan lebih mendalam, seperti pengaruh sistem tata kelola daerah, tingkat pengawasan, atau budaya organisasi terhadap tingkat korupsi di setiap provinsi.
- b. Penelitian ini mencakup seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan cakupan yang luas. Untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk memfokuskan studi pada satu atau beberapa provinsi guna mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan spesifik terhadap faktor-faktor lokal yang memengaruhi

tingkat korupsi.

- c. Diharapkan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) berbasis PROMETHEE dapat terus digunakan dalam penelitian selanjutnya dengan penyesuaian objek penelitian, misalnya dalam menganalisis faktor yang memengaruhi sektor pendidikan, kesehatan, atau investasi di wilayah tertentu.

## **2. Aspek Praktis**

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan demografi. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, memperkuat transparansi pengelolaan anggaran, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai langkah strategis untuk mengurangi korupsi.
- b. Program peningkatan kesejahteraan seperti pemberian upah minimum yang memadai, pengembangan infrastruktur, dan pendidikan anti-korupsi harus menjadi prioritas di provinsi dengan tingkat korupsi tinggi.
- c. Diharapkan adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas di seluruh provinsi.
- d. Masyarakat diharapkan untuk mendukung inisiatif anti-korupsi melalui partisipasi aktif dalam pengawasan publik dan pendidikan tentang dampak buruk korupsi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka.